

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pendidikan politik merupakan sarana untuk memajukan dan membentuk kesadaran kewarganegaraan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan politik adalah sub-bidang pendidikan orang dewasa yang ditujukan khusus untuk mempromosikan sosialisasi dalam kaitannya dengan aktualisasi diri sebagai individu yang bebas dan otonom serta statusnya sebagai warga negara dan komunitas sosial.<sup>3</sup> Tujuan pendidikan politik adalah agar masyarakat luas menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik berusaha membawa individu kepada konsistensi diri yang mandiri untuk menuju arah yang lebih baik dan tidak bersikap apatis untuk dijadikan mekanisme yang kuat dalam menentukan sikap-sikap politik, memilih alternatif politik paling relevan, kemudian melakukan berbagai langkah-langkah yang lebih tepat. Pendidikan politik menuntut individu untuk memiliki wawasan yang baik tentang politik dan masyarakat, mampu bertindak, menentukan sikap politik, dan memiliki informasi politik yang cukup untuk menentukan sikap politik, aktor politik yang baik, melakukan berbagai kebijakan politik untuk masyarakat.

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, "*Pendidikan Politik Sebagai Pendidikan Bagian Orang Dewasa*", (Bandung, Mandar Maju, 2009), Cet. 3. Hal.25

Saat ini, banyak orang yang masih buta akan pendidikan politik dan seringkali berpikir bahwa politik hanya urusan pemerintah dan elit tertentu. Warga negara memiliki pandangan yang lebih luas terkait masalah kebebasan demokratis.<sup>4</sup> Banyak dari mereka yang lewat begitu saja, tidak menyadari visi dan misi dua calon yang bersaing. Akibat ketidakpedulian tersebut, banyak dari mereka yang mudah tertipu dalam pemilu, hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui visi dan misi pasangan calon yang bersaing. Di era digitalisasi saat ini, pendidikan politik sangat dibutuhkan karena tuntutan demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi sendiri tidak hanya menstabilkan politik negara, tetapi juga memberi harapan baru. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk mengubah sikap politik, tetapi juga dapat mendukung upaya reformasi institusi sosial dan politik.

Perkembangan teknologi komunikasi telah menggeser peran media konvensional. Hal ini terjadi terutama bersamaan dengan hadirnya media baru atau dalam istilah yang lain media digital.<sup>5</sup> Di era digitalisasi ini, terutama pada masa pandemi Covid-19, dengan adanya pembatasan sosial mendorong setiap orang untuk menggunakan media digital di berbagai bidang kehidupan. Situasi seperti ini harus dimaknai sebagai pendorong peningkatan kualitas hidup melalui penguasaan teknologi digital. Tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk keperluan belanja,

---

<sup>4</sup> Azed dan Amir, "Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia", (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006), Hal. 15

<sup>5</sup> Ardha, B. "Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia", *Jurnal Visi Komunikasi (Vol.13, No. 1), 2014*, Hal. 113

konsultasi medis, teknologi keuangan atau bahkan untuk berpolitik. Tentunya ini merupakan hal yang baru kita rasakan. Dimana dampak dari pandemi ini bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada keberhasilan suatu demokrasi dengan memanfaatkan sosial media untuk menarik perhatian pemilih dalam menetapkan pilihannya.

Penggunaan media digital untuk kepentingan kegiatan politik dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat khususnya kaum milenial sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang aktivisme politik, melihat sejarah aktivisme politik, dan berpartisipasi aktif dalam aktivisme politik. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai dan memperlakukan teknologi secara baik dan tepat. Namun, di era masyarakat digital pendidikan politik seringkali dipermasalahkan secara nasional, dinamika penggunaan media sosial saat ini digunakan tidak maksimal dan terjadinya pembiasaan berita hoax yang tidak sesuai fakta dan ujaran kebencian.<sup>6</sup> Sehingga argumentasi-argumentasi politik tentang suatu fenomena tertentu akan mempengaruhi cakrawala pemikiran masyarakat.

Suatu tantangan besar bagi negara kita, apakah kita sudah memiliki akses untuk semua kalangan, termasuk kalangan anak-anak hingga remaja. Sebagai generasi milenial yang tumbuh berkembang di era digital maka para pengguna pun turut serta beradaptasi dengan perkembangan kontemporer

---

<sup>6</sup>[https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35836-digitalisasi-  
pendidikan-politik-menjawab-tantangan-pemilihan-2020-di-masa-pandemi](https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35836-digitalisasi-<br/>pendidikan-politik-menjawab-tantangan-pemilihan-2020-di-masa-pandemi). Diakses pada 7  
Februari 2023, pukul 14.28 WIB

yang ada terkait dengan proses pencarian informasi (*information searching*) politiknya. Dalam pengoperasian tersebut tentunya menggunakan media online sebagai bahan rujukan informasi politiknya dan sekaligus mengkombinasikannya dengan bermacam media lainnya.

Salah satu kategori pemilih yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi ialah pemilih pemula. Pemilih pemula umumnya menentukan pilihan berdasarkan suara mayoritas dan tanpa pertimbangan dengan visi yang jauh ke depan. Mereka belum memiliki kesadaran elektoral, belum mampu membebaskan diri dari intimidasi figur maupun pemikiran, belum memahami makna dan konsekuensi dari suara mereka. Salah satu bentuk pengaplikasian dari kemampuan digital yaitu melalui penggunaan dalam hal pengaksesan, penemuan, pengevaluasian, pemanfaatan informasi mengenai kegiatan pemilihan umum sebagai wujud partisipasi politik para pemilih pemula.

Di era digitalisasi yang berkembang saat ini, tingkat partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk informasi yang diperoleh dari media sosial. Media sosial dalam pendidikan politik menjadi faktor utama dalam upaya mempengaruhi dan memobilisir persepsi masyarakat, agar berita yang disajikan dapat mengajak masyarakat untuk memilih.<sup>7</sup> Literasi politik merupakan bentuk pemahaman praktis terkait politik dimana seseorang mengakses dan menggunakan informasi yang didapatkan untuk

---

<sup>7</sup> Bakhtiyar, 2019. "Dinamika Literasi Politik: Urgentitas Memahami Perilaku Pemilih Millennial". *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. Vol 2, No 2, Desember 2018

memilih pemimpin di daerahnya. Pengetahuan untuk memahami pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana mereka menentukan pilihannya untuk lima tahun kedepan serta bagaimana menghadapi isu-isu politik yang marak terjadi pada media, baik isu-isu hoaks, saling menjatuhkan, ataupun isu politik lainnya.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), pengguna internet kategori usia produktif lebih tinggi daripada yang lain yaitu mencapai 60,15% pada usia 20-29 disusul pada usia 9-19 tahun sebanyak 43,90%. Media sosial saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Penggunaan media sosial oleh individu sebanyak 92,82%, dengan pengguna media sosial terbanyak 95,96% adalah generasi milenial. Aktivitas saat terhubung internet 81,90% komunikasi melalui internet, 60,24% penggunaan web browsing, 47,05% bermain game, 26,45% transaksi online. Hasil studi menemukan bahwa aktivitas responden dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah rural dan urban yang memiliki tingkat pendidikan rendah memiliki kecenderungan tidak melakukan penelusuran kebenaran informasi lebih lanjut. Persepsi tentang konten negatif di wilayah rural, rendahnya tingkat pendidikan menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap konten negatif makin besar.<sup>8</sup> Karena Internet telah menjadi bagian yang tidak dapat

---

<sup>8</sup> Kominfo, 2017 “Survei Penggunaan TIK Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat”, [https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi/360\\_3\\_187](https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi/360_3_187) diakses pada 3 Februari 2023, pukul 10.40 WIB

dipisahkan dari kehidupan remaja di Indonesia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kaitannya dengan keamanan berinternet. Hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi, pendidikan literasi maupun pelatihan. Pemahaman penggunaan dan keamanan media digital sangat penting utamanya dari perspektif kaum muda, sebelum merancang program-program informasi tentang keamanan digital. Termasuk memahami tentang cara mereka mengartikan dan menggunakan teknologi digital, komunikasi secara *online* dan perilaku berisiko atau tidak aman. Tantangan untuk mengatasi ini dan memungkinkan untuk menggunakan teknologi digital guna untuk menghindari dampak negatif seminimal mungkin.

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan politik. Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang penyelenggara pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap dan independen di seluruh tanah air. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri merupakan penjelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), lembaga yang menyelenggarakan pemilu pada masa Orde Baru.

Peningkatan partisipasi politik harus dipertimbangkan tidak hanya di kalangan pemilih pada umumnya, tetapi juga ketika melakukan segmentasi pemilih tertentu. Di tulungagung sendiri, berdasarkan rilis yang

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), sensus penduduk yang diadakan tahun 2020 berjumlah 1.089.775 terdiri atas 545.254 penduduk laki-laki dan 544.521 penduduk perempuan. Sementara itu apabila dilihat dari klasifikasi kelompok umur, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Umur (Tahun)	Presentase (%)
0-4	6,41
9-10	6,74
10-14	7,00
15-24	14,41
25-34	14,21
35-39	7,81
45-50	7,77
>50	27,75

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung*

Dari komposisi penduduk sebagaimana yang tertera dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Tulungagung terdiri atas penduduk usia sekolah, dimana populasi generasi pada kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 14,41% dan disusul pada kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 14,21% dari total keseluruhan populasi.<sup>9</sup> Pada tahun 2020 populasi generasi yang lahir di era digitalisasi atau usia 15-34 tahun adalah 28,62% dari total 1.089.775 penduduk di Kabupaten Tulungagung. Besarnya populasi generasi

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung, "Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulungagung, 2020"

<https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2021/04/16/5174/penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-tulungagung-2020.html>. (Diakses pada 23 Mei 2023, pukul 12.01 WIB)

muda, termasuk generasi milenial di dalamnya, menjadi sebuah entitas yang sangat mewarnai dalam kehidupan bermasyarakat saat ini.

Pada era digital saat ini, keberadaan generasi muda semakin mendominasi kehidupan sehari-hari karena interaksi dan konektivitas yang tinggi dengan segala hal yang berbau digital. Populasi generasi milenial di negara berkembang rata-rata cukup dominan karena negara banyak yang memiliki piramida penduduk muda.<sup>10</sup> Jadi, ketika pemilih pemula mampu diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, peluang untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu akan cukup signifikan. Selain itu, pada era digital ini media sosial juga digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mensosialisasikan tentang pemilu dengan harapannya partisipasi pemilih bisa meningkat.

Tantangan sebenarnya ada pada saat pemilu yang akan diadakan beberapa tahun kedepan yang disitulah terdapat berbagai kandidat yang ikut serta dalam pemilu. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Tulungagung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu diharapkan dapat menjadi mitra untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Pemilih pemula tentu saja masih dalam tahap melihat dan mengidentifikasi, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pendidikan politik di era digitalisasi terutama generasi yang berhubungan erat dengan

---

<sup>10</sup> Kuncoro, B & Novianti, "Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial". *Jurnal Pendidikan Sosiologi FIS*, Hal. 3



dunia digital dimana mereka lebih banyak mengakses berbagai pengetahuan dan informasi terutama dalam hal politik.

Berdasarkan uraian diatas untuk kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pendidikan Politik Di Era Digitalisasi Bagi Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengukur tingkat pendidikan politik dan strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung bagi pemilih pemula maka peneliti menggunakan data tingkat partisipasi pemilih pada periode penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 2018-2019 sebagai awalan bahan analisa permasalahan pada penelitian ini.
2. Data-data pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dari tahun 2019-2023 untuk pemilihan umum bagi pemilih pemula.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan terkait efektivitas pendidikan politik di era

digitalisasi bagi pemilih pemula di Komisi Pemilihan Umum yang akan dikaji dalam studi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung di era digitalisasi?
2. Bagaimana efektivitas pendidikan politik di era digitalisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung bagi pemilih pemula?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang akan dikemukakan oleh penulis, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Tulungagung di era digitalisasi
2. Untuk mengetahui efektivitas pendidikan politik di era digitalisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung bagi pemilih pemula.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta peningkatan khazanah keilmuan bagi pengembang ilmu

pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi bagi para peneliti sejenis di masa mendatang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Pemilih Pemula

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilih pemula agar memahami pentingnya pendidikan politik di era digitalisasi serta dapat meningkatkan kesadaran untuk politik yang lebih baik.

### b. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pendidikan politik di era masyarakat digital saat ini.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam kajian-kajian yang lainnya untuk menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam berpolitik.

## F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan kesalahpahaman terkait dengan istilah yang digunakan dalam penelitian judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terkait istilah yang terdapat dalam judul, dan batasan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pendidikan Politik

Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kapasitas individu untuk menyadari diri mereka sebagai manusia yang bebas dan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk mengembangkan status mereka sebagai warga negara.<sup>11</sup> Pendidikan politik dapat menciptakan budaya politik yang sehat dan pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat yang demokratis.

#### b. Era Digitalisasi

Era digitalisasi merupakan suatu kondisi atau zaman dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi serba digital. Era masyarakat digital merupakan masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan

---

<sup>11</sup> Eko Handoyo dan Puji Lestari, "*Pendidikan Politik*", (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017)

mikro elektrik berbasis informasi digital dan teknologi informasi.<sup>12</sup> Perubahan bentuk dan pola komunikasi telah menciptakan era digitalisasi yang merupakan akibat dari dualitas sosial dan struktur ekonomi kapitalis, masyarakat konsumen potensial yang berperan sebagai konsumen produk tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi.

c. Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan suatu kelompok pemilih yang baru pertama kali turut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pada proses pemilihan umum, para pemilih pemula baru akan merasakan dan mendapatkan pengalaman dalam melakukan pemilihan umum. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum.

d. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni yang meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak

---

<sup>12</sup> Rulli Nasrullah, "Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi", (Bandung : Sambiosa Rekatama Media), Hal.10

boleh disamakan dengan lembaga negara lain yang kekuasaannya ditentukan dan dipegang oleh UUD 1945. KPU dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Tulungagung.

## 2. Definisi Operasional

Pendidikan politik adalah usaha sadar yang dilakukan secara sengaja dan terorganisir yang dilaksanakan oleh orang tua, lembaga formal maupun informal, yang diberikan kepada masyarakat. Terlebih khususnya pada generasi calon pemilih pemula untuk memberikan pengetahuan dan menyadarkan generasi muda mengenai pentingnya ikut serta secara aktif dalam berpolitik. Maksud dari judul penelitian “Efektivitas Pendidikan Politik Di Era Digitalisasi Bagi Pemilih Pemula dalam Perspektif Hukum Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung” yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana strategi pada Komisi Pemilihan Umum yang mana mempunyai kewajiban dalam memberikan sosialisasi pendidikan politik yang visioner terhadap pembangunan bangsa kedepannya. Sehingga jangan sampai para pemilih khususnya pemilih pemula yang suaranya sangat dibutuhkan untuk kepentingan politik justru dipermainkan oleh informasi politik dan politik uang.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika penulisan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal, terdiri atas : Halaman sampul depan dan halaman judul.
2. Bagian Utama, terdiri atas :
  - a. Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan terkait dengan Strategi Pendidikan Politik Di Era Digitalisasi Bagi Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
  - b. Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisikan uraian tentang Efektivitas, Pendidikan Politik, Era Digitalisasi, Pemilih Pemula, Komisi Pemilihan Umum, Hukum Pemilu dan Penelitian Terdahulu.
  - c. Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisikan uraian tentang segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian, yakni meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
  - d. Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang diperoleh dan juga fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai efektivitas pendidikan politik di era digitalisasi bagi pemilih pemula yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tulungagung dan temuan penelitian atas rumusan masalah yang pertama dalam penelitian.

- e. Bab V Pembahasan hasil temuan, pada bab ini terdiri sub bab yang membahas tentang penyajian dan analisis data hasil penelitian. Penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Strategi Pendidikan Politik Di Era Digitalisasi Bagi Pemilih Pemula Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
  - f. Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Efektivitas Pendidikan Politik Di Era Digitalisasi Bagi Pemilih Pemula dalam Perspektik Hukum Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.
3. Bagian Akhir, terdiri atas : Daftar Pustaka